

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18) sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132).

Menurut Djaenuri (2012) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Anggraeni dan Puranata (2010) besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan semakin berkurang. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek PAD antara lain untuk provinsi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

A. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Mangkusubroto (1994) pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya. Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
2. Sebagai alat pengatur (regulatory)

B. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

C. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.2 Pariwisata

2.1.2.1 Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi :

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
2. Perusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah seperti keindahan alam, gunung merapi danau dan pantai.
3. Perusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata, sarana pariwisata terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar dan angkutan wisata.

4. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu (Spillane,1987).

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperluka yaitu :

1. Harus bersifat sementara.
2. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan.
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan PAD, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi bagi pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

2.1.2.2 Jenis Pariwisata

Jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan menurut James J, Spillane (1987: 28-31) dapat dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut :

1. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

2. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*).

Pariwisata untuk dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.

3. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar dipusat riset, mempelajari adat istiadat, mengunjungi monument bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.

4. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games dan SEA Games serta buat

mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting dan memancing.

5. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, symposium, siding dan simar internasional.

2.1.3 Wisatawan

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar (Windriyangrum, 2013:28). Rekomendasi *PATA (Pacific Area Travel Association)* yang didasarkan atas batasan *League of Nation* tahun 1936 yang telah diberi amandemen oleh Komisi Teknik *IUOTO (International of Official Travel Organizations)* menyatakan bahwa wisatawan diartikan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri di mana biasanya ia tinggal, mereka ini meliputi:

Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan kesehatan.

Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi.

Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang di tempatkan di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan (Pendit, 1999:39). Tujuan wisata untuk melakukan perjalanan wisata ada beberapa macam, salah satunya untuk bersenang-senang di daerah tujuan wisata tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan:

1. Wisatawan lokal (*local tourist*), yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.
2. Wisatawan mancanegara (*international tourist*), yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang bersal dari luar negeri.
3. *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.
4. *Business tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.
5. *Common interest tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.
6. *Individual tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.

7. *Group tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok (Windriyaningrum 2013:29)

Ramainya kunjungan wisatawan memberi banyak manfaat bagi daerah tujuan, dengan banyaknya wisatawan akan memberi dampak positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi obyek wisata.

2.1.3.1 Pengeluaran Wisatawan

Pengeluaran Wisatawan pada dasarnya adalah sebuah proses konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh wisatawan selama dalam perjalanan berwisata. Menurut Yoeti (2008:197) secara sederhana, konsumsi/pengeluaran wisatawan adalah barang dan jasa (*goods and services*) yang dibeli oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectations*) selama ia tinggal di DTW yang dikunjunginya. Pengeluaran wisatawan salah satu yang menyumbang pada devisa negara selain dari pengeluaran individu dan pengeluaran kolektif.

Pengeluaran wisatawan (*tourist expenditures*) pada suatu negara perlu dihitung dengan cermat. Kegunaan praktisnya adalah untuk mengetahui berapa besar devisa yang diperoleh dari industri pariwisata yang dikembangkan pada suatu negara tertentu. Pengeluaran wisatawan biasanya mencakup pada akomodasi hotel, bar dan restoran, transportasi lokal, *tours* atau *sightseeing*, cenderamata, dan keperluan-keperluan lainnya (Yoeti, 2008:296).

Komponen pengeluaran wisatawan sesuai dengan *General Guideline For Developing The Tourism Satelite Account* (WTO) dibedakan menjadi dua tipe yaitu pengeluaran konsumsi akhir wisatawan dan transfer sosial wisatawan. Pengeluaran konsumsi akhir wisatawan dapat berupa pengeluaran konsumsi yang dibayar secara tunai dan konsumsi dalam bentuk barang. Sementara itu transfer sosial wisatawan dapat berupa *social security*, biaya konsultasi, jasa non pasar wisata. Distribusi pengeluaran wisatawan, dimana pada umumnya pengeluaran tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan akomodasi hotel dan keperluan makan-minum, sedangkan yang lainnya sangat bervariasi. (Prof. Dr. Salah wahab dalam buku Yoeti, 2008:202).

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Perjalanan Wisata

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perjalanan wisata adalah sebagai berikut Foster (1985:5) :

1. Profil Wisatawan (Tourist Profile)

Profil wisatawan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Karakteristik sosial ekonomi wisatawan (Socio-economic characteristic) yang meliputi umur, pendidikan dan tingkat pendapatan.
- b. Karakteristik tingkah laku (behavioural Characteristic) yang meliputi motivasi, sikap dan keinginan wisatawan.

2. Pengetahuan untuk melakukan perjalanan (travel awareness) yang meliputi informasi tentang daerah tujuan wisata serta ketersediaan fasilitas dan pelayanannya.
3. Karakteristik perjalanan (trip features) yang meliputi jarak, waktu tinggal di daerah tujuan, biaya dan waktu perjalanan.
4. Sumber daya dan karakteristik daerah tujuan (resources and characteristic of destination) yang meliputi jenis atraksi, akomodasi, ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan, kondisi lingkungan dan sebagainya.

Keempat faktor di atas dirumuskan melalui unsur penawaran (supply) dan unsur permintaan (demand). Adanya kedua unsur yang berlawanan ini melahirkan berbagai jenis kegiatan rekreasi yang dapat dinikmati oleh pengunjung di suatu kawasan wisata. Faktor yang mendorong suatu perjalanan wisata dari daya tarik objek wisata diharapkan membentuk citra atau image. Citra wisata adalah gambaran yang diperoleh wisatawan dari berbagai kesan, pengalaman dan kenangan yang didapat sebelum, ketika dan sesudah mengunjungi objek wisata.

Dengan demikian untuk membentuk citra dari suatu kawasan wisata perlu adanya suatu produk wisata yang dapat mempengaruhi perjalanan seorang wisatawan. Produk tersebut dirumuskan dengan menampilkan objek yang menarik dan sarana yang mendukung sehingga mempunyai nilai kompetisi.

2.1.4 Obyek Wisata

Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, Obyek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Obyek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain. Suatu tempat/daerah agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal pokok berikut.

1. Adanya something to see. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat.
2. Adanya something to buy. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.
3. Adanya something to do. Maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Umumnya di beberapa daerah atau negara, untuk memasuki suatu Objek Wisata para wisatawan diwajibkan untuk membayar biaya masuk atau karcis masuk yang merupakan biaya retribusi untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas Objek Wisata tersebut. Beberapa Objek Wisata ada yang dikelola oleh Pemerintah dan adapula yang dikelola oleh pihak swasta. Objek

Wisata yang dikelola oleh pihak swasta dapat berupa Objek Wisata alami maupun buatan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi negara (Nasrull,2010).

2.1.5 Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar-kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Pengertian rasio occupancy merupakan tolak ukur keberhasilan hotel dalam menjual produk utamanya, yaitu kamar. Night auditor biasanya mengumpulkan data-data dari room division dan menghitung “occupancy ratio”, sementara front office manager menganalisa informasi ini untuk mengidentifikasi “trends” (sesuatu yang sedang hangat berlangsung), “Pattern (pola tamu) “Problem” (masalah yang dihadapi).

Dalam analisis ini front office manager harus memutuskan bagaimana suatu occupancy dapat memberikan efek bagi outlet lainnya. Sebagai contohnya misalnya, bila “multiple occupancy” meningkat maka “average daily room rate”

juga akan meningkat. Bila occupancy “double occupancy” tinggi, maka penjualan food and beverage juga akan meningkat.

Persentase double occupancy dapat dipergunakan untuk memperkirakan:

1. Penyediaan stok barang / bahan makanan di food and beverage department.
2. Penyiapan “room supplies”
3. Perhitungan “Average daily room rate”

Hotel occupancy adalah tingkat hunian kamar dari suatu hotel yang mana data tersebut dapat dipergunakan sebagai alat perbandingan bagi hotel itu sendiri terhadap hotel lain dalam rangka “bisnis”. Hotel occupancy dihitung tiap hari.

2.1.6 Hubungan Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Disadari bahwa setiap potensi kepariwisataan berada didaerah, potensi kepariwisataan ini dapat menjadi obyek wisata andalan yang mampu berkembang dan bertahan terus terpelihara dengan baik, tentu saja semua ini sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang dimilikinya. Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti usaha perhotelan, restoran dan penyelenggaraan paket wisata, banyak kegiatan ekonomi lainnya yang berhubugan dengan pariwisata, sebagai transportasi, telekomunikasi dan bisnis eceran. Dampak positif pariwisata terhadap perekonomian diantaranya adalah sebagai berikut (Leiper,1990) :

1. Pendapatan dari penukaran valuta asing.
2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri.
3. Pendapatan dari usaha atau bisnis wisata.
4. Pendapatan pemerintah.
5. Penyerapan tenaga kerja.
6. *Multiplier Effect* (efek ekonomi yang ditimbulkan atas kegiatan ekonomi pariwisata).
7. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal.

Pariwisata juga membawa implikasi negatif terhadap negara tujuan wisata dan komunitas daerahnya. Pengaruh negatif tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Terjadinya leakages impor dan ekspor, penurunan pendapatan pekerja dan penerimaan bisnis lokal. Leakage impor meliputi pengeluaran impor untuk peralatan, makanan dan minuman, serta produk-produk lain yang tidak bisa dipenuhi oleh negara tujuan wisata yang sesuai dengan standar pariwisata internasional. Leakage ekspor adalah aliran keluar keuntungan yang diraih oleh investor asing yang menandai resorts dan hotel. Para investor asing mentransfer penerimaan atau keuntungan pariwisata keluar dari negara tujuan wisata (host country).

Adanya batasan manfaat bagi masyarakat daerah yang terjadi karena pelayanan kepada turis yang serba inklusif. Keberadaan paket wisata yang serba inklusif dalam industri pariwisata, dimana segala sesuatu tersedia, termasuk

semua pengeluaran yang didefinisikan menurut ukuran turis internasional dan memberikan lebih sedikit peluang bagi masyarakat daerah untuk memperoleh keuntungan dari pariwisata.

Sektor pariwisata telah diakui sebagai sektor yang terpenting dan menguntungkan terutama di tinjau dari sudut pandang perekonomian yang banyak menghasilkan devisa bagi negara. Banyak negara didunia yang menjadikan pariwisata sebagai sumber pemasukan keuangan yang utama seperti Spanyol, Monaco, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri pariwisata telah tercantum didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pariwisata mampu menunjang pembangunan negara karena :

1. Membantu menciptakan sekaligus menambah lapangan pekerjaan diberbagai sektor.
2. Membantu mengembangkan industri-industri lainnya didaerah tujuan wisata seperti kerajinan, pertokoan, restoran dan lain-lain.
3. Pariwisata memungkinkan terjaganya kelestarian ala serta kebudayaan.
4. Menumbuhkan rasa salaing mengenal dan menghargai antar bangsa sehingga dapat mempeerat hubungan antar manusia yang cinta damai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan dapat

meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah :

Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan.

1. Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.
2. Menambah devisa negara, semakin banyaknya wisatawan yang datang maka makin banyak devisa yang akan diperoleh.
3. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan, restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan Hiburan), dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah bagi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Jawa Barat :

1. Jumlah Wisatawan

Menurut Yoeti (2008) kedatangan wisatawan mancanegara atau nusantara merupakan sumber penerimaan bagi daerah atau negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut Cohen (1984) dalam Pitana dan Diarta (2009) suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Jika wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut sangat banyak, maka pengeluaran uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut antara lain :

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa negara.
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja.
- d. Dampak terhadap harga-harga.
- e. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan.
- f. Dampak terhadap kepemilikan dan control.
- g. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
- h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Menurut Wahab (1996) wisatawan yang tiba disuatu negara asing, baik secara individu maupun dalam kelompok, apapun tujuan perjalanannya, akan membelanjakan uangnya selama menetap di daerah tujuan untuk membayar jasa- jasa atau barang wisata dan membeli jasa-jasa atau barang yang tidak berkaitan dengan wisata. Seluruh jumlah uang yang dibelanjakan merupakan jumlah penerimaan negara dari sektor pariwisata dan menjadi pola konsumsi wisatawan di negara tersebut. Semakin bertambah konsumsi wisatawan, semakin banyak pula jasa-jasa wisata yang diproduksi.

Secara teoritis, semakin banyak jumlah wisatawan dan semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha diindustri pariwisata dari pembayaran atas pelayanan yang diterima oleh wisatawan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan komponen dari PAD industri pariwisata. Misalnya, pajak atas pelayanan hotel, restoran, hiburan ataupun retribusi diindustri pariwisata. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan

wisatawan ke Jawa Barat, maka akan meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Barat.

2. Jumlah obyek wisata

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut.

Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi negara (Badrudin,2001).

Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) . Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, khususnya wisata alam dan wisata budaya. Dengan demikian banyaknya jumlah obyek wisata yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

3. Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Menurut Dinas Pariwisata hotel merupakan suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan,

dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Dewasa ini pembangunan hotel- hotel berkembang dengan pesat, apakah itu pendirian hotel- hotel baru atau pengadaan kamar- kamar pada hotel- hotel yang ada. Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha.

Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi masyarakat dan wisatawan. Tingkat Hunian Hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Vicky, Hanggara). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Oleh karena itu industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para wisatawan tersebut semakin lama menginap (Badrudin, 2001). Sehingga juga akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak penghasilan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, bahkan sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu proses penyusunan penelitian ini adalah :

1. **Betania Pramesti, 2014** . Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita dan Investasi Terhadap. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah wistawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat anlisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil yang didapat dari penelitian ini Variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan.
2. **Md. Krisna Arta Anggara dan Ni Gst. Putu Wirawati, 2013**. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/ Kota di Provinsi Bali. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sekabupaten/kota di Provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan. Kontribusi Pajak daerah lebih dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 84,9% dan kontribusi retribusi daerah sebesar 16,6%.

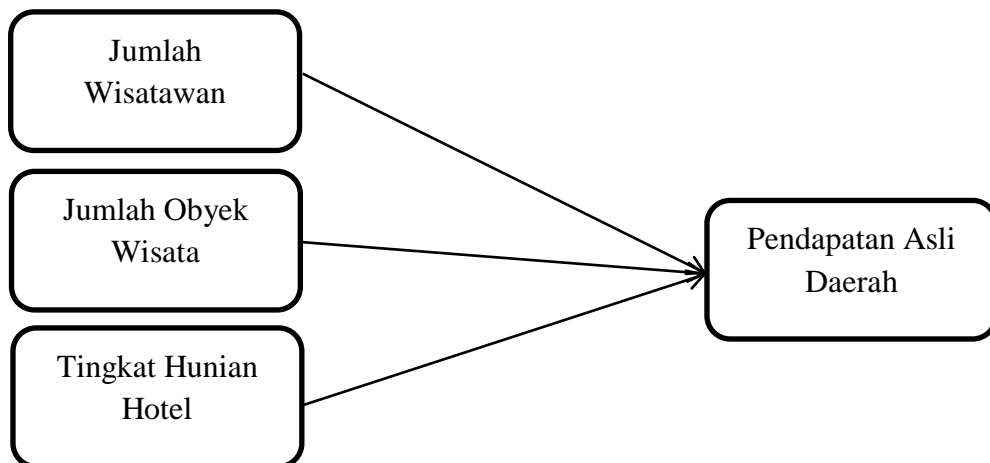
3. I Gusti Agung Satrya Wijaya dan I Ketut Djayastra,2014. Pengaruh Kunjungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar tahun 2001-2010. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu Variabel kunjungan wisatawan, dan jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar tahun 2001-2010.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis Dan Tahun	Judul	Tujuan	Alat Analisis	Hasil
1	Betania Pramesti, 2014	Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta	Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Analisis regresi data panel	Variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan
2	Md. Krisna Arta Anggara dan Ni Gst. Putu Wirawati, 2013	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/ Kota di Provinsi Bali.	Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sekabupaten/kota di Provinsi Bali	Analisis regresi linier berganda	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan. Kontribusi Pajak daerah lebih dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 84,9% dan kontribusi retribusi daerah sebesar 16,6%
3	I Gusti Agung Satrya Wijaya dan I Ketut Djayastra, 2014	Pengaruh Kunjungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010	Untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar tahun 2001-2010	Analisis regresi linier berganda	Variabel kunjungan wisatawan, dan jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar tahun 2001-2010

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan beberapa teori dan penelitian terdahulu mengenai berbagai hubungan antar variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat digambarkan model kerangka teori sebagai berikut



2.4 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, penulis mengajukan hipotesis bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1. Diduga Jumlah Wisatawan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga Jumlah Obyek Wisata memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga Tingkat Hunian Kamar Hotel memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.